

ADMINISTRATIO

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan

MODEL PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA PEKANBARU

Adianto, Mayarni dan Dadang Mashur

JALAN BERLIKU MENUJU PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TEPAT WAKTU

(Study Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Blitar)

Fia Laksono

EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dewi Ayu Hidayati

DAMPAK EKONOMI POLITIK KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL DI INDONESIA

Tiara Novita dan Noverman Duadji

TRANSFORMASI ORGANISASI PENYEDIA JASA LAYANAN JAMINAN KESEHATAN (STUDI TENTANG TRANSFORMASI

PT. ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN)

Bayu Kurniawan dan Syamsul Maarif

PARTISIPASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI

(P2TP2A-LIP) DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

Rahma Diani Sormin dan Izzul Fatchu Reza

EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DI TELUK LAMPUNG (STUDI DAMPAK SOSIAL-EKONOMI NELAYAN KELURAHAN SUKARAJA PADA KASUS REKLAMASI PANTAI DI KELURAHAN BUMI WARAS, KECAMATAN

BUMI WARAS, KOTA BANDAR LAMPUNG)

(Fitri Wahyuni dan Meiliyana)

IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN *GUIDELINE*) DALAM MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

(Serli Ani dan Eko Budi Sulistio)

SOCIAL WELFARE POLICY AND SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDONESIA

Diandini Rahmawati Irawan dan Ita Prihantika

**IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN *GUIDELINE*) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2016**

Serli Ani

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila
Email: serli.ani@fisip.unila.ac.id

Eko Budi Sulistio

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Unila
Email: eko.budi@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana program bersih program di Lampung. Penelitian ini didukung oleh lingkungan alam yang tidak menentu, tingkat pendidikan nelayan rendah, pola hidup nelayan, pemasaran tertangkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan model van Meter dan Van Horn yang terdiri dari Standard and Policy Goals, Resources, Relationship Among the Organization, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Disposisi Pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya untuk melihat pemanfaatan peraturan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasilnya adalah bahwa program bersih sudah cukup efektif meski ada sedikit kendala dan masalah dalam praktik. Dengan menggunakan pendekatan van meter dan van horn, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan program bersih telah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak didasarkan pada situasi di lapangan. Dibutuhkan standar kebijakannya yang lebih jelas dan terperinci, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dan keuangan, perlu adanya perluasan, semestinya dilakukan komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat nelayan atau masyarakat agar tidak memberatkan negatif tentang program bersih.

Kata kunci: implementasi, program bersih, kesejahteraan, komunitas nelayan

ABSTRACT. *This study attempts to describe how have program net program in the Lampung. This research supported by the natural environment erratic, the level of education fishermen low, the life patterns of the fishermen, marketing are caught. This research is used Van Meter and Van Horn's approach of implementation model which consist of Standard and Policy Goals, Resources, Relationship Among The Organizations, Characteristics of Implementer Agent, Condition of Social, Economic and Politic and Disposition of Implementer. The method used in this research is descriptive qualitative. Furthermore, to see the utilization of the regulation, the research applies triangulation technique. The result is that the net program has been quite effective though there were a little obstacles and problem in practice. Using approach van meters and van horn, it can be analyzed that the implementation of net program has been running as determined, although there are still some indicator not based on the situation on the ground. It took his policy standard clearer and detailed, it needs the increase in human resources and financial, it needs the expansion, should be made the communication and dialogue between stakeholders and fishermen or community representatives community leaders to deprive issue negative about net program.*

Keywords: implementation, net programs, welfare, fishing community

LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki sumber daya alam salah satunya di bidang kelautan. Potensi di bidang kelautan yang cukup tinggi terlihat dari hasil perikanan itu sendiri, untuk Ibu Kota Provinsi sendiri yaitu Kota Bandar Lampung dengan hasil perikanan mampu mencapai 23.665,84 ton/tahun setelah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 35.476,26 ton/tahun dan Lampung Timur sebesar 37.520,67 ton/tahun (Badan Pusat Statistik, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini belum mampu dirasakan oleh masyarakat Provinsi Lampung. Dikarenakan kondisi kehidupan nelayan dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masih sangat sulit. Masyarakat nelayan berada di garis kemiskinan dikarenakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Kondisi alam yang tidak menentu.
2. Tingkat pendidikan nelayan.
3. Pola kehidupan nelayan.
4. Pemasaran hasil tangkapan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah mengambil langkah untuk mengetaskan kemiskinan masyarakat nelayan dengan mengeluarkan dan menerapkan Program Jaring. Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) adalah inisiatif jangka pendek OJK dan KKP untuk menjangkau sektor kelautan dan perikanan, yang bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan. Dalam program ini terdapat pihak yang terlibat yaitu pihak OJK yang merupakan pihak yang membentuk program jaring tersebut, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang memiliki tugas mencari nasabah dalam program jaring, serta pihak perbankan yang memiliki tugas di lapangan dalam program tersebut.

Kegiatan dalam Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) ini untuk

Para Bank (BNI, BRI, Mandiri, Danamon, BTPN, Permata, Bukopin, SulSelBar) mencakup monitoring realisasi kredit baru Bank Partner Ke sektor Kelautan dan Perikanan, pertukaran informasi antara OJK, KKP, dan bank Partner, pelaksanaan *Focus Group discussion* (FGD) di Jakarta pada awal November 2015 mengenai strategi mitiasi resiko bisnis sektor kelautan dan perikanan dalam memetakan permasalahan dan solusi untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan, serta penyusunan *Grand Design Program Jaring*.

Akan tetapi pada kenyataan Program Jaring ini masih banyak kekurangan diantaranya masih ada nelayan yang tidak bisa mengakses Program Jaring, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga masyarakat masih merasakan sulit dalam hal prosedur dan syarat yang harus dipenuhi.

Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) juga terlihat dari pencapaian target pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari data Bank mitra pemerintah yang memberikan pinjaman serta yang dijadikan mitra oleh pemerintah (BRI, BNI, Danamon, Mandiri, Permatya, Bukopin, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), dan PT BPD Sulselbar, yang memberikan pinjaman pada nelayan. Berikut adalah tabel terkait perkembangan pelaksanaan Program Jaring oleh 8 bank partner dan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) sampai dengan September 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.8 Bank Partner dan IKNB sampai dengan September 2015

Nb	Nama Bank Partner	Nominal Komitmen 2015	Growth Komitmen 2015 (%) Dibanding Outstanding Desember 2014	Penyaluran Kredit Kp Sampai Septeber 2015	Share Penyaluran Kredit Kp Thd Total Komitmen Tahun 2015 (%)
	1	2	3	4	5 $(4/2)*100\%$
1.	BRI	2,500	52,00%	2,919.09	116,76%
2.	BNI	1,000	94,88%	393.95	39.39%
3.	MANDIRI	1,250	81.70%	624.00	49.92%
4.	DANAMON	300	94.64%	107.31	35.77%
5.	BTPN	50	50.66%	221.99	443.98%
6.	PERMATA	180	56.25%	50.00	27.78%
7.	BUKOPIN	81	91.01%	62.37	77.00%
8.	SULSELBAR	13	19.52%	32.59	250.67%
	TOTAL	5,374	67.83%	4,411.29	82.09%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun Mei-September 2015

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa realisasi penyaluran kredit baru (*gross*) ke sektor KP oleh Bank partner sampai dengan akhir September 2015 telah mencapai Rp 4,41 triliun atau 82,09% dari target agregat 8 bank Partner sebesar Rp 5,37 triliun. Beberapa bank yang telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit *gross* adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), dan PT BPD Sulselbar. Dan masih banyak bank yang belum menjalankan tugasnya untuk mencapai target, diantaranya yaitu Bank BNI, Danamon, Mandiri, BTPN, Permata, Bukopin.

Melalui program dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam penelitian ini peneliti fokus tentang bagaimana pengimplementasian Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*). peneliti tertarik membahas Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*), pada aspek implementasi kebijakan publik. khususnya di lihat dari

sasaran program. Hal ini mengingat Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*), merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat nelayan. Penelitian ini dilakukan karena peneliti sadar bahwa setiap kebijakan yang menyangkut masyarakat yang terkait dengan masalah prosedur, maupun dana yang menjadi hak masyarakat bawah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat nelayan.

Peneliti juga memfokuskan Implementasi kebijakan dari dimensi variabel-variabel yang terdapat dalam Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn diantaranya tolak ukur tingkat keberhasilan dari Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*), sumber daya dan dumber daya kebijakan (komunikasi), Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana (Komunikasi organisasi formal dan informal, Cakupan atau wilayah), Struktur birokrasi, Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi, Disposisi implementor.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik meneliti bagaimana Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan *Guideline*) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, yaitu **Bagaimana implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) di Provinsi Lampung ditinjau dari Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn?**

c. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, *Guideline*) sebagai salah satu upaya atau strategi pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan para nelayan.

KAJIAN TEORI

a. Teori Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Chief J.O Udoji dalam Wahab (2004:5) kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

- b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**
Menurut William Dunn (2003:25) tahap-tahap kebijakan publik meliputi:
1. Penyusunan Agenda
 2. Formulasi Kebijakan
 3. Adopsi/ Rekomendasi Kebijakan
 4. Implementasi/ Pelaksanaan Kebijakan
 5. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

c. Implementasi Kebijakan Publik 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149-150) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Van Meter dan Van Horn
Model implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari

keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

- 1) Standar dan Sasaran Kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Hubungan antar organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana
- 5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi
- 6) Disposisi implementor

b. Menurut Edwards dalam Winarno (2012:177), studi implementasi adalah kusal bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Untuk menjawab dua pertanyaan pokok tersebut, maka Edward dalam Winarno (2012:177) mengusulkan empat variabel yang menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut yaitu:

- 1) Komunikasi.
- 2) Sumber daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

c. Model Weimer dan Vinin
Weimer dan Vining dalam Suharno (2013:178) memiliki pandangan lain terhadap sebuah proses implementasi kebijakan. Menurut mereka ada tiga kelompok besar variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Logika kebijakan.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan.
- 3) Kemampuan implementor kebijakan

e. Pemberdayaan Masyarakat

1. Kesejahteraan untuk semua

Menurut Chamber dalam Mardikanto, dkk (2015:25) Masalah kemiskinan, nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Oleh karena itu Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan.

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktiivitas sosialnya, dll.

Karena itu, World Bank dalam Mardikanto, dkk (2015:25) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau meyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, dan tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian msyarakat.

d. Pengertian Program Jaring

1. Definisi & Tujuan Program

- a. Program JARING 2015 merupakan program inisiatif jangka pendek OJK (Regulator) dan KKP (Pemerintah) untuk menjangkau

sektor kelautan dan perikanan, dengan cara bersinergi dengan Pelaku Jasa Keuangan (PJK) termasuk asosiasi, dengan sasaran akselerasi pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan melalui pembuatan *Guideline* kepada sektor jasa keuangan dari hulu sampai hilir (*value chain*) serta peran serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. JARING merupakan akronim dari Jangkau, Sinergi dan *Guideline*.

- b. Program JARING 2015 bertujuan menjawab kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi tentang database Kelautan dan Perikanan, skim pembiayaan, pemetaan risiko bisnis dan dukungan regulasi dari otoritas terkait.

2. Target Program

Target utama program JARING adalah peningkatan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan yang terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Deskriptif.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Perbankan (BRI) Provinsi Lampung

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam rangka penelitian ini meliputi: a) sumber data primer. b) sumber data sekunder

d. Fokus Masalah Penelitian

Fokus masalah penelitian Menurut Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Suharno (2013:179) yang meliputi :

- a. Standard dan sasaran kebijakan
- b. Sumberdaya
 - 1) Sumber Daya Manusia
 - 2) Sumber Daya Finansial

- c. Hubungan antar organisasi
- d. Karakteristik agen pelaksana
 - 1) Struktur birokrasi
 - 2) Norma-norma
- e. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi
- f. Disposisi implementor
 - 1) Respons implementor terhadap kebijakan
 - 2) Kondisi, dan
 - 3) Intens disposisi implementor,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung

a. Standar dan Sasaran Program

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:176) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur karena ketidakjelasan standar dan sasaran kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan. Berdasarkan temuan di lapangan, dalam melaksanakan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) tidak adanya standar yang menjadi acuan atau payung hukum. Dikarenakan Program ini merupakan program himbuan saja. Seharusnya untuk melaksanakan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) ini pemerintah segera membuat pedoman tersendiri dan tidak lagi hanya berpatokan kepada Undang-Undang atau peraturan menteri saja. Dengan demikian, terkait sasaran dalam kebijakan ini belum seperti apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa dalam sebuah kebijakan harus ada standar yang jelas, karena standar yang ada dalam kebijakan ini belum benar-benar jelas. Belum lagi selama ini kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah belum menyentuh masyarakat, karna masyarakat yang lain tetap dalam keadaan miskin. Apalagi sasaran dalam Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) ini adalah masyarakat nelayan.

b. Sumber daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:161) selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Jika dilihat dari indikator sumber daya Van Meter dan Van Horn, maka dapat dikatakan bahwa mengenai hal sumber daya dalam Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung masih sangat kurang dan harus lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI).

c. Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) jalinan hubungan kerja sama sinergis diperlukan agar instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagai realitas dari program kebijakan maka diperlukan adanya hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi.

Jika dilihat dari indikator menurut Van Meter dan Van Horn tentunya sudah sangat sesuai, karena dalam melaksanakan program perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik tersebut, maka akan dihasilkan sebuah pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta sedikitnya kemungkinan untuk terjadinya konflik dan persaingan yang negatif dalam pelaksanaan program ini dan para *stakeholders* akan mengalami kemudahan dalam mengambil keputusan. Selain itu, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar agen pelaksana ini juga dapat mengembangkan dan memelihara keharmonisan di antara *stakeholders* selama kegiatan ini berlangsung.

1. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) di dalam suatu

implementasi kebijakan untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasi dan diketahui agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung jika dilihat dari indikator menurut Van Meter dan Van Horn terkait karakteristik agen pelaksana dapat dikatakan sudah baik, karena petugas yang ada sudah mematuhi Nota Kesepakatan yang telah dibuat serta adanya ketepatan waktu yang diberikan petugas, sehingga dengan adanya kepatuhan implementor tersebut dapat berakibat pada kelancaran pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung.

2. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipasi yaitu mendukung atau menolak, serta sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah *elite* politik mendukung implementasi kebijakan.

Keadaan sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu indikator yang akan mempengaruhi jalannya sebuah kebijakan. Apabila ketiganya mempengaruhi untuk diterapkan sebuah program atau kebijakan maka dengan mudah program ini dilaksanakan. implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di lihat dari indikator van Meter dan van horn ini belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. maka Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) sebagai tetapi upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya sudah tepat, walaupun terdapat tantangan dari berbagai pihak yang tidak menginginkannya.

3. Disposisi Implementor

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013:177) dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor.

Terkait dengan pemahaman implemendor terhadap Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*), dapat dikatakan sudah baik karena implementor sudah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pokok implementor. Namun, dari beberapa implementor yang telah paham terhadap program ini, pastinya ada juga dari beberapa dari mereka yang masih kurang patuh terhadap apa yang harusnya mereka lakukan dan bisa menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program ini. Selanjutnya, para implementor pun menganggap bahwa program ini memang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat nelayan, dan Otoritas Jasa Keuangan disini membantu dalam hal mengurangi ketergantungan masyarakat nelayan pada rentenir.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sasarannya pun sudah tepat yaitu masyarakat nelayan Namun, terkait standar, dalam pelaksanaan program ini belum adanya standar yang benar-benar jelas yang menjadi tolak ukur keberhasilan program. Hal ini dikarenakan Program Jaring (*Jangkau, Sinergi, dan Guideline*) merupakan Program himbuan sehingga tidak ada *Standar Operating Procedure* dan payung hukum.
2. Melihat ketersediaan sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumberdaya finansial, dimana sumber daya manusia masih harus mengalami perbaikan dari segi kuantitasnya. Terkait sumber daya finansial juga

- masih perlu mendapatkan perhatian lebih, karena ketersediaan anggaran yang ada sangat minim.
3. Terkait hubungan organisasi antara otoritas jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Perbankan (BRI) yang bergabung untuk melaksanakan program ini menjalin hubungan yang sangat baik dan selalu ada koordinasi antara pembuat program, pelaksana dan penyaluran kreditnya sehingga mengakibatkan tidak adanya miss komunikasi yang dapat menimbulkan permasalahan besar.
 4. Masalah karakteristik agen pelaksana, Dinas kelautan dan Perikanan tidak memiliki SOP, namun hanya saja implementor sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mentaati aturan-atura yang dibuat oleh pemerintah. Implementor yang ada selama ini sudah cukup mematuhi aturan yang ada, namun kepatuhan itu harusnya lebih ditingkatkan lagi agar tingkat kedisiplinan implementor lebih baik yang terdapat didalam Nota Kesepakatan.
 5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik juga turut menjadi variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam pelaksanaan program ini, karena sebagian besar masyarakat yang hadir dalam program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) adalah masyarakat nelayan yang memang menginginkan program ini namun terkendala pada biaya dan prosedur persyaratan untuk mengajukan pengkreditan Di dalam kondisi sosial ekonomi politik juga sangat berpengaruh untuk berjalannya program ini.
 6. Sejauh ini program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) telah dipahami oleh implementor dengan baik, dimana implementor telah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) di Provinsi Lampung.
- b. Saran**
1. Perlu dibuatnya standar yang lebih rinci dan jelas lagi terkait pelaksanaan Program (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) yang dapat menjadi pedoman pelaksanaannya agar tidak terjadi multiinterpretasi pada program ini.
 2. Perlu adanya peningkatan kerjasama (*team work*) antara Petugas bagian pencairan dana peminjaman modal usaha Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) untuk saling membantu hasil Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) dengan melihat berbagai aspek kehidupan dan kepentingan bersama.
 3. Perlu adanya peningkatan sumber daya finansial yang dapat menunjang keberhasilan program serta tercapainya sarana prasarana yang memadai dengan cara meningkatkan anggaran untuk melaksanakan program ini.
 4. Dalam pelaksanaan Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) masih mengalami kekurangan staff atau sumber daya manusia untuk mensosialisasikan program ini lebih luas lagi, maka dari itu sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan menambah lagi sumber daya manusia yang bertugas di lapangan dengan cara merekrut pegawai baru, serta perlu diadakannya peningkatan kualitas atau mutu dari setiap implementor dengan memberikan pelatihan-pelatihan.
 5. Membuka ruang komunikasi publik yang luas agar Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) ini dapat tersosialisasi dengan baik, serta kejelasan program ditiap metode hingga pada efek samping dapat diketahui oleh para nelayan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan sosialisasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI).
 6. Membuat forum komunikasi dan dialog antara masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perbankan (BRI).

beserta perwakilan ulama dan tokoh masyarakat yang ada, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) supaya tidak menimbulkan *miss* komunikasi yang dapat menghilangkan isu-isu negatif tentang Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Salemba Humanika.
- , 2004. *Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino. 2008. *Memahami ilmu politik*. Bandung: AlPI.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mardianto, Prof. Dr. Ir. Totok, M.S,dkk. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: sage Publication
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta
- Sulistio, Eko Budi. 2013. *Buku Ajar Kebijakan Publik (Public Policy): Kerangka Dasar Studi Kebijakan Publik*.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gova Media.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Yogyakarta:C A P S.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang - undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- DkpLampung.hol.es/sejaraj/dinas-Kelautan-dan-Perikanan-provinsi-Lampung.diaksestanggal22Oktober2016)
- <http://dhizzztie.wordpress.com/2011/05/09/kehidupan-masyarakat-pesisir-Lampung.diakses12Oktober2016>)
- <http://seputarLampung.co.id/program-jaring-untuk-pengembangan-kelautan-dan-perikanan/diakses5/10/2015:16.00>)
- www.ojk.go.id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/pages/tugas.aspx.diaksestanggal12Oktober2016)
- PesisirLampung.blogspot.co.id/2011/05/potensi-sumber-daya-alam-pesisir.html?m=1. diakses tanggal 12 Oktober 2016